

## STRATEGI INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM: KONSEPSI, KEBIJAKAN, DAN IMPLEMENTASINYA

Tatang Sudrajat<sup>1)</sup>, Agus Salim Mansyur<sup>2)</sup>, Qiqi Yulianti Zakiyah<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Sangga Buana Bandung

<sup>2)</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>3)</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : [id.tatangsudrajat@gmail.com](mailto:td.tatangsudrajat@gmail.com)

### *Abstract*

*The education curriculum is an important part of the national education system. This has been regulated in several state / government regulations which are basically public policies. Educational innovation, especially the curriculum is needed to always be in accordance with the demands of the changing times. With library study and normative juridical research methods, it is known that the curriculum of Islamic education has been established and structured as part of the education policy system through various state / government regulations. This policy is a product and the authority of state / government institutions in responding to public interests in the form of a curriculum that is always in harmony with the changing times. The concepts of innovation in general and educational innovation, especially curriculum innovation is outlined by experts as part of the treasury of education. There are certain strategies that are owned by innovators and there are various challenges and problems in the process of curriculum innovation faced by innovators in their implementation.*

**Keywords:** *strategy, education, curriculum, educational innovation*

### **Abstrak**

Kurikulum pendidikan merupakan salah satu bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Hal ini telah diatur dalam beberapa regulasi negara/pemerintah yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Inovasi pendidikan, khususnya kurikulum diperlukan agar selalu sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan kajian kepustakaan, diketahui bahwa kurikulum pendidikan Islam telah ditetapkan dan tersusun sebagai bagian dari sistem kebijakan pendidikan melalui berbagai regulasi negara/pemerintah. Kebijakan ini merupakan produk dan otoritas lembaga negara/pemerintah dalam merespon kepentingan publik berupa kurikulum yang selalu selaras dengan perkembangan jaman.

Konsep inovasi secara umum dan inovasi pendidikan, khususnya inovasi kurikulum diuraikan oleh para ahli sebagai bagian dari khasanah ilmu pendidikan. Ada strategi tertentu yang dimiliki para inovator serta terdapat berbagai tantangan dan permasalahan dalam proses inovasi kurikulum yang dihadapi para inovator dalam implementasinya.

**Kata kunci :** strategi, pendidikan, kurikulum, inovasi pendidikan

## A. Pendahuluan

Banyak yang meyakini bahwa kemajuan satu bangsa akan sangat tergantung pada keberhasilan sistem pendidikan nasionalnya. Terdapat banyak elemen yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan, diantaranya adalah kurikulum. Kurikulum pada dasarnya adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Dalam pemakaian sehari-hari, kurikulum sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian, yaitu dalam arti sederet mata pelajaran pada suatu jenjang dan jenis sekolah, dalam arti silabus, serta dalam arti program sekolah<sup>1</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

---

<sup>1</sup>Tafsir, Ahmad. Filsafat Pendidikan Islam. Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu. Memanusiakan Manusia. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2017. 102.

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kurikulum merupakan salah satu perangkat dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional suatu bangsa, yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bidang pendidikan. Dalam konteks ini, salah satu jenis pendidikan yang menjadi perhatian negara adalah pendidikan agama, diantaranya pendidikan Islam yang sangat penting keberadaannya bagi pembentukan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa sekaligus menguasai iptek.

Institusi pendidikan tidak berada dalam ruang hampa udara, tetapi sangat berkaitan dan saling ketergantungan dengan beberapa institusi di luarnya. Para pengelola pendidikan dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk tuntutan dari para pemangku kepentingan lainnya tentang kurikulum yang sedang berlaku. Tuntutan untuk selalu menyesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan lingkungan ini, tidak saja menyangkut substansi dan rencana pembelajaran tetapi juga berkenaan dengan cara seorang pendidik menjalankan rencana pembelajarannya. Dalam pandangan Peter Ling, *'in a changing environment, curriculum based on knowledge requirements of the world of today is unlikely to suit the world of tomorrow. Changing social and work environments not only generate a need for new knowledge and skills but also a need to access education incrementally, fragmentally and immediately'*.<sup>2</sup>

Inovasi yang terjadi pada berbagai bidang kehidupan tentu berperan penting dan memberi dampak pada masyarakat. Manusia dalam sejarah

---

<sup>2</sup>Fraser, Kym (Editor). Education Development and Leadership in Higher Education. Developing an Effective Institutional Strategy. London :RoutledgeFalmer. Taylor& Francis Group. 2005. 12.

peradabannya sangat terbantu dengan berbagai kemudahan dalam menjalani kehidupannya. *What is the overall function of innovation in a modernized industrial system? To increase productivity. Some economists believe that innovation is the lifeblood of industrialized society, whether it be capitalist or communist*'.<sup>3</sup> Salah satu area inovasi manusia adalah pendidikan.

Terdapat beberapa hal yang menuntut adanya inovasi pendidikan, yaitu 'perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan penduduk, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, menurunnya kualitas pendidikan, kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang'.<sup>4</sup>

Inovasi kurikulum merupakan bagian dari inovasi pendidikan, yang menurut B. Suryosubroto 'merupakan suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan'.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, inovasi kurikulum menjadi faktor penting untuk terselenggaranya proses pembelajaran yang selaras dengan tuntutan masyarakat.

Tulisan ini mengelaborasi hal-hal yang berkaitan dengan strategi inovasi kurikulum baik tentang konsepsi, kebijakan maupun tantangan dan permasalahannya ketika diimplementasikan.

---

<sup>3</sup>House, Ernest R. *The Politics of Educational Innovation*. Berkeley California : McCuthan Publishing Corporation. 1974. 258.

<sup>4</sup>Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT RajaGrafindoPersada. 1999. 189-191

<sup>5</sup>Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT RajaGrafindoPersada. 1999. 187

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan yuridis normatif. Fokus peneliti pada berbagai sumbertertulis yang terdapatdalambuku, jurnal dan bentuk dokumen tertulis lain yang memuat tentang topik inovasi pendidikan dan kurikulum, serta pada substansi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan atau mengatur tentang kurikulum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Inovasi dan Inovasi Kurikulum**

*An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. Newness in an innovation need not just involve new knowledge. The “newness” aspect of an innovation may be expressed in terms of knowledge, persuasion, or decision to adopt.*<sup>6</sup> Beberapa karakteristik inovasi yaitu *relative advantage, compatibility, complexity, trialability and observability.*<sup>7</sup> Dikemukakan lebih lanjut bahwa *‘relative advantage is the degree to which an innovation is perceived as better than the idea it supersedes. Compatibility is the degree to which an innovation is perceived as being consistent with the existing values, past experiences, and needs of the receivers. Complexity is the degree to which an innovation is perceived as difficult to understand and use. Trialability is the degree to which an*

---

<sup>6</sup>Rogers, Everett M. Rogers. Diffusion of Innovations. Third Edition. New York : The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 1983. 11.

<sup>7</sup>Rogers, Everett M. dan F. Floyd Shoemaker. Communication of Innovations. A cross-Cultural Approach. New York : The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 1971. 22.

*innovation may be experimented with on a limited basis. Observability is the degree to which the results of an innovation are visible to others'.<sup>8</sup>*

Inovasi bukan suatu aktivitas tunggal, melainkan suatu serangkaian proses yang panjang dan sambung menyambung. Rogers menyebutnya sebagai *Model of the Innovation-Decision Process*, yaitu :

- a. Knowledge, occurs when an individual (or other decision making unit) is exposed to the innovation's existence and gains some understanding of how it functions.*
- b. Persuasion occurs when an individual (or others decision making unit) forms a favorable or unfavorable attitude toward the innovation.*
- c. Decision occurs when an individual (or other decision making unit) engages in activities that lead to a choice to adopt or reject the innovation.*
- d. Implementation occurs when an individual (or other decision making unit) puts an innovation into use.*
- e. Confirmation occurs when an individual (or other decision making unit) seeks reinforcement of an innovation-decision already made, but he or she may reverse this previous decision if exposed to conflicting messages about the innovation.*

Kurikulum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan nasional. Dalam pendidikan, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan, kurikulum hendaknya disusun secara adaptif, responsif, dan visioner sesuai dengan tuntutan

---

<sup>8</sup>Rogers, Everett M. dan F. Floyd Shoemaker. *Communication of Innovations. A cross-Cultural Approach*. New York : The Free Press. A Division of Macmillian Publishing Co., Inc. 1971. 21-23

zaman yang akan datang.<sup>9</sup>Kurikulum dianggap sebagai komponen yang penting karena ia merupakan rencana program pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang jelas bagi semua orang yang terlibat dan berkepentingan dengannya.<sup>10</sup>

Salah satu sasaran inovasi pendidikan menurut Rusydi Ananda dan Amiruddin adalah kurikulum. 'Inovasi kurikulum terkait dengan gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam tataran institusi sekolah, maka kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah'.<sup>11</sup>

Dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalkan keresahan guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang dianggap kurang berhasil, keresahan pihak administrator pendidikan tentang kinerja guru, atau mungkin keresahan masyarakat terhadap kinerja dan hasil bahkan sistem pendidikan. Keresahan itu pada akhirnya membentuk permasalahan yang menuntut penanganan dengan segera. Upaya untuk memecahkan masalah itulah muncul gagasan atau ide baru sebagai suatu inovasi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Mundiri, Akmal dan Reni Uswatun Hasanah. Inovasi Pengembangan Kurikulum PAI di SMP Nurul Jadid. Jurnal Tadrib. Vol. IV. No. 1. Juni 2018. 59.

<sup>10</sup>Nizar, Samsul dan Muhammad Syaifudin. Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 2010. 270-271.

<sup>11</sup>Rifa'i, M (Editor). Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan. Medan: CV Widya Puspita. 2017.

<sup>12</sup>Harahap, Khairuddin Ahmad Hidayah. Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 097523 Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Jurnal Edu Riliga, Vol.2 No.2 April-Juni 2018. 278.

Inovasi dan pengembangan kurikulum idealnya berawal dari kebutuhan para pelaksana pembelajaran di lapangan yang memahami secara utuh permasalahan peserta didik. Upaya ini memerlukan landasan yang jelas dan kokoh, sehingga tidak mudah terombang ambing oleh transformasi dan inovasi pendidikan dan pembelajaran yang begitu dahsyat sebagaimana terjadi akhir-akhir ini.<sup>13</sup>

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam menurut Muhaimin ‘dapat diartikan dalam tiga perspektif, yaitu kegiatan yang menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam, proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik, dan/atau kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam’.<sup>14</sup> Tujuan inovasi pendidikan menurut Tim Dosen FIP IKIP adalah pembaruan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan serta upaya mengembangkan pendidikan yang lebih efektif dan ekonomis.<sup>15</sup>

Penjelasan Peraturan Menteri Agama Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab, dengan mengutip pendapat Klein (1992) bahwa pendidikan yang dalam hal ini kurikulum madrasah sebagai *the art of education* harus mempersiapkan generasi bangsa yang mampu hidup dan berperan aktif dalam kehidupan lokal, nasional dan global yang mengalami perubahan dengan cepat tersebut. Penjelasan ini juga mengutip pendapat Olivia

---

<sup>13</sup>Sugiana, Aset. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Implementasinya di MTS NurulUmmah Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. XVI. No.1. Juni 2019. 25.

<sup>14</sup>Irsad, Muhammad. “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah (Studi Atas Pemikiran Muhaimin)”. *Jurnal Iqra’*. Vol.2.No.1. November 2016. 24.

<sup>15</sup>Ananda, H. Rusydidan Amiruddin. *Inovasi Pendidikan :Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan*. Medan : CV Widya Puspita. 2017. 6.

(1982) yang mengemukakan bahwa kurikulum perlu memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan politik.

Setiap pendidik atau satu institusi ketika melakukan inovasi tentu telah memiliki strategi untuk dapat mengimplementasikannya secara efektif. Strategi adalah *'the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals'*.<sup>16</sup> Strategi ini antara pendidik atau organisasi yang satu dengan yang lainnya sangat boleh jadi memiliki perbedaan strategi, tergantung pada berbagai hal, diantaranya kondisi tempatnya bertugas, lingkungan sosial, prediksi terhadap respon peserta didik yang akan muncul, serta aspek momentum yang dianggap tepat untuk melaksanakan inovasi.

## 2. Kebijakan Kurikulum

Setiap upaya inovasi kurikulum tentu tidak akan terlepas dari berbagai regulasi pemerintah yang berbentuk undang-undang maupun ketentuan turunannya, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Karena tujuan dan muatan kurikulum ditujukan untuk kepentingan publik berupa hadirnya kurikulum yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka semua regulasi tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan publik (*public policy*) yang area substansinya tentang pendidikan (*educational policy*).

Kebijakan publik adalah *'the combination of basic decisions, commitments, and actions made by those who hold or influence*

---

<sup>16</sup>Robbins, Stephen P. Organization Theory. Structure, Design, and Applications. Third Edition. London : Prentice Hall International, Inc. 1990. 121.

*government positions of authority*'.<sup>17</sup> Kebijakan ini pada level yang paling operasional ditindaklanjuti oleh kebijakan organisasi setiap lembaga pendidikan yang merancang, menetapkan dan mengembangkan kurikulum atau melakukan inovasi kurikulum. Dalam konteks intern organisasi seperti itu, kebijakan (*policy*) didefinisikan Walter H.Klein dan David C.Murphy sebagai '*all those directives, both explicit and implied, that designate the aims and ends of an organization and the appropriate means to be used in their accomplishment. In brief, it means the set of purposes, principles, and rulers of action that guide an organization*'.<sup>18</sup>

Dalam praktek pendidikan di Indonesia, tentu saja landasan konstitusional pendidikan adalah sebagaimana tersebut dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 31, yang diantaranya menyebutkan bahwa tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan suatu sistem pendidikan nasional. Sebagai derivasi dari ketentuan Pasal 31 UUD 1945 tersebut, maka DPR dan Presiden membentuk UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menggantikan undang-undang tentang pendidikan sebelumnya. Pasal 36 undang-undang tersebut antara lain menyebutkan bahwa (1) pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik,(3) kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan

---

<sup>17</sup>Gerston, Larry N. Public Policy Making. Process and Principles.Third Edition. Armonk New York : M.E. Sharpe. 2010. 7.

<sup>18</sup>Harrison, F. Policy, Strategy, and Managerial Action.Boston : Houghton Mifflin Company. 1986. 2.

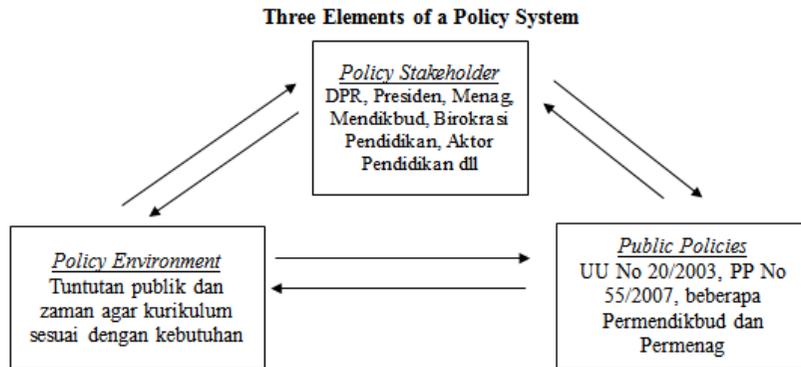
peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Terdapat makna implisit dari Pasal 36 tersebut berkenaan dengan tuntutan agar implementor kebijakan pendidikan melakukan inovasi, yaitu bahwa pengembangan kurikulum sesuai dengan peserta didik, serta penyusunannya antara lain dengan memperhatikan minat peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan global. Pentingnya inovasi kurikulum sebagai bagian integral dari pendidikan nasional juga secara implisit tersebut dalam Pasal 1 angka 2 bahwa salah ciri pendidikan nasional adalah tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam konteks ini, terdapat hubungan keterkaitan antara kebijakan tentang kurikulum sebagai bagian dari kebijakan publik tentang pendidikan dan kebijakan organisasi dengan para pemangku kepentingan kebijakan pendidikan (pembuat kebijakan, implementor kebijakan, pelaksana teknis kebijakan pendidikan, pengamat pendidikan dan yang lainnya) serta dengan lingkungan kebijakan pendidikan. Dengan kata lain, terdapat hubungan interaktif antara *policy stakeholders*, *public policy* dan *policy environment*, yang oleh Dunn dinamakan sebagai *The Policy System*.<sup>19</sup> Dalam kaitan ini, inovasi kurikulum sebagai bagian dari inovasi pendidikan dan kebijakan publik di bidang pendidikan dapat diletakkan dalam kerangka *The Policy System* dengan skema sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Dunn, W. N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs. 1981. 46.



Sumber : Dunn, 1981:46

**Gambar 1.** *Three Elements of a Policy System*

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ditetapkan pemerintah dengan membentuk peraturan pemerintah. Berkenaan dengan kurikulum, maka Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Secara definitif, dalam PP tersebut maupun dalam beberapa Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ditemukan istilah inovasi kurikulum, tetapi istilah pengembangan kurikulum. Baik inovasi maupun pengembangan memiliki makna yang sama, yaitu adanya kebaruan, sehingga dalam analisis ini pengembangan kurikulum memiliki makna yang sama dengan inovasi kurikulum.

Pada level kebijakan yang lebih operasional, disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, antara lain bahwa, (1) Kurikulum Pendidikan Agama disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan

oleh satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, (2) Kurikulum Pendidikan Agama dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lingkungan sekolah (3) Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.

Demikian pula Pasal 22 PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah menyebutkan bahwa setiap madrasah wajib melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. PMA ini telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan PMA Nomor 66 Tahun 2016. Selain itu, keberadaan kurikulum pendidikan agama ini diatur pula dalam beberapa ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Keberlakuan kurikulum pendidikan agama supaya memiliki daya penerapan yang kuat karena landasan yuridisnya kuat, maka ditetapkan sesuai dengan kewenangan Menteri Agama. Diantaranya telah terbit Kepmen Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah, serta Kepmen Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah.

### 3. Tantangan dan Permasalahan

Pendidik di lembaga pendidikan Islam formal, diantaranya guru dan dosen, ketika akan melakukan inovasi, termasuk dalam mengimplementasikan strategi inovasi, dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan. Mengacu pada pendapat Rogers tentang tahap inovasi, maka pada tahap knowledge tantangan kepada inovator adalah harus bisa meyakinkan para pemangku kepentingan pendidikan khususnya tentang kurikulum bahwa inovasi yang dilakukannya benar-benar dibutuhkan untuk perbaikan kurikulum dan masa depan pendidikan. Permasalahan dapat muncul berupa kurang percaya dirinya pelaku inovasi karena berbagai keterbatasan yang dimiliki secara personal. Terkait dengan inisiator atau aktor inovasinya pemerintah, dalam era sekarang hal ini terkait juga dengan kepercayaan publik kepadanya. Dalam kaitan ini, dalam konteks perubahan global terdapat beberapa kekuatan yang berpengaruh dalam lingkungan eksternal diantaranya erosi kepercayaan diri pada semua lembaga termasuk pemerintah, keluarga, dan agama.<sup>20</sup>

Pada tahap *persuasion*, merupakan tantangan tersendiri bagi inovator untuk tumbuhnya sikap yang baik dari pihak lain berupa penerimaan secara terbuka terhadap inovasi yang ditawarkan. Dalam kaitan ini dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik untuk meyakinkan mereka dapat menerima inovasi tersebut. Permasalahan dapat muncul karena faktor sarana berkomunikasi (bahasa, media/saluran dll) atau lingkungan tempat gagasan inovasi dikemukakan. Dalam konteks administrasi pendidikan, *communication does not take place unless the receiver correctly or accurately interprets the information being transmitted. In an administrative context, communication requires a high*

---

<sup>20</sup>Nanus, Burt. Kepemimpinan Visioner. Menciptakan Kesadaran Akan Arah dan Tujuan di Dalam Organisasi (terjemahan). Jakarta: PT. Prenhallindo. 2001. 223.

*level of understanding*.<sup>21</sup> Pada tahap *decision*, tantangan yang muncul bagi seorang inovator yang sangat kritis, karena kemungkinannya hanya ada dua yaitu mengambil/menyetujui atau menolak terhadap gagasan inovasi. Karena itu, intensitas interaksi sosial dari inovator berupa penggunaan berbagai media komunikasi sangat diperlukan. Permasalahan tentu saja akan muncul, diantaranya berupa sikap pesimisme dari inovator terhadap inovasi yang ditawarkan.

Pada tahap *implementation* sebagai wujud nyata suatu inovasi tantangannya berupa minimnya keyakinan untuk memulai suatu inovasi. Sangat mungkin seorang inovator berada pada dilema untuk menetapkan momentum dalam eksekusi sebuah inovasi. Permasalahannya adalah ketiadaan dukungan dari para pemangku kepentingan, serta kurangnya sumberdaya organisasi yang diperlukan (manusia, keuangan, sarana, informasi, wewenang dll). Roy Wernham mengemukakan beberapa masalah yaitu sumber daya berupa manusia, uang, atau material tidak selamanya tersedia pada saat dibutuhkan; penyesuaian perilaku karyawan terhadap strategi baru dan struktur baru tidak jarang menimbulkan masalah yang cukup memakan waktu; kurangnya informasi mengenai berbagai faktor yang berkaitan dengan strategi baru itu, yang berakibat pada produk atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki; diantara unit-unit kerja dalam organisasi tidak jarang dijumpai tujuan-tujuan yang bertentangan satu dengan yang lain sehingga membutuhkan waktu lama bagi manajemen untuk menyelesaikannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Hoy, Wayne K. dan Cecil G. Miskel. Educational Administration. Theory, Research, and Practice. Fourth Edition. New York : McGraw-Hill, Inc. 1991.345.

<sup>22</sup>Salusu, J. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1996.432.

Inovasi pada tahap ini seharusnya dieksekusi menjadi sesuatu kenyataan, dengan meminimalkan berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul sejak awal. Pada tahap *confirmation*, tantangannya berupa kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi konflik yang akan muncul ketika dan setelah inovasi dilaksanakan. Konflik merupakan ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa masalah. Sasaran yang saling tergantung dan persaingan memperebutkan sumberdaya yang terbatas sering menyebabkan timbulnya konflik. Konflik tidak mungkin dihindari dalam organisasi, jadi harus ditangani dan diselesaikan sebelum konsekuensi yang merusak fungsi mempengaruhi prestasi kerja organisasi.<sup>23</sup> Kemampuan untuk membangun jejaring serta mengonsolidasikan berbagai kekuatan pendukung di dalam maupun di luar organisasi sangat diperlukan. Jangan sampai gagasan inovasi berbalik arah ke titik nol hanya karena muncul astigmatisme dari inovator.

#### **D. PENUTUP**

Kurikulum merupakan elemen penting bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional, yang keberadaannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik. Kurikulum dalam pendidikan Islam sebagai subsistem dari kurikulum nasional dan sistem pendidikan nasional harus senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan pesertadidik, perkembangan lingkungan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, inovasi kurikulum diperlukan untuk terus menjadikan kurikulum sebagai rohnya pendidikan. Terdapat beberapa tantangan dan permasalahan ketika suatu inovasi diinisiasi dan diimplementasikan.

---

<sup>23</sup>David, Fred R. *Manajemen Strategis*. Edisi Ketujuh. Versi Bahasa Indonesia (Penerjemah : Alexander Sindoro). Jakarta : PT Indeks. 2004.228.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rifa'i, M (Editor). Inovasi Pendidikan :Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan. Medan : CV WidyaPuspita. 2017.
- David, Fred R. ManajemenStrategis. EdisiKetujuh. VersiBahasa Indonesia (Penerjemah : Alexander Sindoro). Jakarta : PT Indeks. 2004.
- Dunn, W. N. Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffts.1981.
- Fraser, Kym (Editor). Education Development and Leadership in Higher Education.Developing an Effective Institutional Strategy.London :RoutledgeFalmer.Taylor& Francis Group. 2005.
- Gerston, Larry N. Public Policy Making. Process and Principles.Third Edition. Armonk New York : M.E. Sharpe. 2010.
- Harahap, Khairuddin Ahmad Hidayah. InovasiPembelajaranPendidikan Agama Islam di SD Negeri 097523 PerumnasBatu VI KecamatanSiantarKabupatenSimalungun.JurnalEduRiliga, Vol.2 No.2 April-Juni 2018.
- Harrison, F. Policy, Strategy, and Managerial Action.Boston : Houghton Mifflin Company. 1986.
- Hasbullah.Dasar-DasarIlmuPendidikan.Jakarta : PT RajaGrafindoPersada.1999.
- House, Ernest R. The Politics of Educational Innovation.BarkeleyCalifornia :McCuthan Publishing Corporation. 1974.
- Hoy, Wayne K. dan Cecil G. Miskel. Educational Administration.Theory, Research, and Practice.Fourth Edition. New York : McGraw-Hill,Inc. 1991.
- Irsad, Muhammad. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah (StudiAtas Pemikiran Muhaimin)". JurnalIqra'. Vol.2.No.1. November 2016.

- Nanus, Burt. Kepemimpinan Visioner. Menciptakan Kesadaran Akan Arah dan Tujuan di Dalam Organisasi (terjemahan). Jakarta: PT. Prenhallindo. 2001.
- Nizar, Samsul dan Muhammad Syaifudin. Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam. Jakarta : Kalam Mulia. 2010. Mundiari, Akmal dan Reni Uswatun Hasanah. Inovasi Pengembangan Kurikulum PAI di SMP Nurul Jadid. Jurnal Tadrib. Vol. IV. No. 1. Juni 2018.
- Robbins, Stephen P. Organization Theory. Structure, Design, and Applications. Third Edition. London : Prentice Hall International, Inc. 1990.
- Rogers, Everett M. dan F. Floyd Shoemaker. Communication of Innovations. A cross- Cultural Approach. New York : The Free Press. A Division of Macmillian Publishing Co., Inc. 1971.
- Rogers, Everett M. Rogers. Diffusion of Innovations. Third Edition. New York : The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 1983.
- Tafsir, Ahmad. Filsafat Pendidikan Islam. Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu. Memanusiakan Manusia. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2017.
- Salusu, J. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1996.
- Sugiana, Aset. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Implementasinya di MTS Nurul Ummah Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. XVI. No. 1. Juni 2019.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peraturan Menteri Agama Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah